

Program Keluarga Berencana (KB):

Investasi Bagi Peningkatan Kualitas SDM Indonesia



Pertambahan penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hasil proyeksi BPS dan appenas menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 231,4 juta dan menjadi 249,7 juta pada 2015. Jika Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Indonesia saat ini stagnan (terhenti) pada 1,3%, maka diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan meningkat dua kali lipat setiap 50 tahun. Kenaikan jumlah penduduk berdampak pada persoalan ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan energi, pengendalian lingkungan hidup, dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Saat ini IPM Indonesia berada pada peringkat 108 dari 162 negara. (Sumber: HDI Report 2010, UNDP).

Pertambahan penduduk berhubungan dengan jumlah kelahiran. Secara nasional, jumlah rata-rata anak dalam periode masa reproduksi perempuan (Total Fertility Rate/ TFR) di Indonesia adalah 2,3. Akan tetapi jika dilihat per daerah, terjadi kesenjangan (disparitas) menyangkut TFR. Contohnya: TFR di Jogjakarta adalah 1,5 sementara TFR di NTT dan Maluku sekitar 3,7. Kesenjangan (disparitas) menjadi sebuah tantangan yang harus diselesaikan untuk memperbaiki TFR secara nasional. Selain perlu adanya arah program nasional yang jelas, di lain sisi kondisi spesifik setiap daerah – misalnya: apa penyebab terjadinya kesenjangan (disparitas) yang besar menyangkut TFR antar daerah – perlu di analisa untuk mengembangkan pendekatan dan program yang spesifik berbasis situasi lokal. Dengan cara ini, maka usaha untuk memperkecil kesenjangan (disparitas) antar daerah bisa diperkecil untuk memperbaiki TFR secara nasional sehingga memberikan sumbangan terhadap penurunan LPP di Indonesia.

Pengaturan kehamilan dan kelahiran memberikan kontribusi terhadap penurunan kematian ibu di Indonesia. Semakin sering perempuan melahirkan maka risiko kesakitan dan kematian saat kehamilan, persalinan dan paska persalinan semakin tinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara, meskipun terjadi penurunan dari 307/100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2003) menjadi 228/100.000 kelahiran hidup di tahun 2007 (SDKI, 2007). Sementara target Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, Angka Kematian Ibu (AKI) harus bisa diturunkan hingga 125/ 100.000 kelahiran hidup. Dengan kata lain, target MDGs 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu, merupakan target yang paling 'tidak tercapai (off track)' diantara semua target MDGs lainnya di Indonesia.

Penduduk yang terus bertambah memberikan beban ekonomi yang besar baik dari sisi rumah tangga (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, kematian dan lainnya) maupun biaya subsidi pelayanan dasar yang akan ditanggung pemerintah. Pertambahan penduduk juga

memberikan beban sosial yang tak kalah besar, seperti: kemacetan, keterbatasan akses lapangan pekerjaan, keterbatasan ruang bermain, perubahan pola hidup dan relasi antar manusia, dan aspek sosial lainnya. Upaya menekan pemanasan global juga tentu saja sangat berhubungan ngan pengendalian pertumbuhan penduduk yang besar.

Untuk menjawab tantangan itu semua, sejarah panjang menunjukkan bahwa Indonesia pernah memiliki pengalaman mengesankan yang memberikan manfaat besar dalam menunjang pembangunan, yaitu melalui program KELUARGA BERENCANA (KB).

Secara nyata, program KB memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan perempuan sehingga mampu melakukan kerja-kerja produktif. Program KB juga secara efektif melindungi perempuan dari risiko kesakitan dan kematian saat kehamilan, persalinan dan paska persalinan sehingga memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Dengan program KB, kesempatan keluarga untuk menghemat pengeluaran biaya rumah tangga meningkat dan dengan jumlah ideal anggota keluarga maka kualitas hubungan keluarga, kualitas kesehatan dan pendidikan anggota keluarga menjadi meningkat. Kondisi ini memberikan sumbangan besar bagi banyak keluarga untuk mempersiapkan anggota keluarga yang produktif dan kompetitif sehingga memiliki daya saing dalam dunia kerja dan dalam jangka panjang bisa memutus mata rantai kemiskinan (poverty trap).

Program KB menguntungkan negara karena memberikan sumbangan yang besar dalam penghematan biaya negara untuk subsidi pelayanan dasar. Dengan menekan tingkat pertumbuhan penduduk melalui program KB, memberikan kesempatan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya dengan lebih baik melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar serta jaminan perlindungan hak-hak dasar warga negara sehingga warga negara Indonesia bisa menjadi lebih produktif dan kompetitif. Jika melihat manfaat diatas, maka jelas sudah bahwa program KB adalah sebuah cara yang efektif untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Otonomi daerah memberikan peluang sekaligus tantangan dalam penguatan program KB. Jika kita simak, hampir semua kabupaten/ kota di Indonesia mencantumkan visi pembangunan daerah mereka adalah untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM serta mencapai target MDGs. Akan tetapi banyak prioritas pembangunan daerah tidak sejalan dengan visi pembangunan yang akan diwujudkan. Dengan hanya memprioritaskan pada pembangunan fisik dan mengabaikan 'manusia' sebagai aset pembangunan maka sulit untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut. Program KB merupakan investasi yang secara jelas memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia sehingga menjadi 'aset' berharga dalam menggerakkan pembangunan Indonesia.

Rekomendasi untuk pembuat kebijakan :

1. Pemerintah dan parlemen perlu memperkuat komitmen untuk memprioritaskan program KB secara nasional sebagai bagian dari upaya pembangunan untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
2. Kesepakatan dengan semua Gubernur serta Bupati/ Walikota perlu didorong agar menunjukkan komitmen dan memberikan prioritas terhadap program KB di daerah.
3. Alokasi anggaran untuk program KB perlu diperbesar untuk mendukung kebutuhan informasi, pendidikan serta pelayanan KB bagi masyarakat.
4. Penguatan kapasitas dan peran lembaga ujung tombak untuk gerakan program KB seperti: Posyandu, Puskesmas, dan Bidan Desa perlu ditingkatkan. Penjangkauan dan pendidikan masyarakat terhadap Program KB harus dilaksanakan di Posyandu mengingat peran Posyandu yang sangat strategis dalam menjangkau masyarakat di tingkat terbawah.
5. Kemitraan dalam pendidikan masyarakat dan ketersediaan pelayanan KB antara pemerintah, parlemen, penyedia pelayanan dan organisasi kemasyarakatan perlu diperkuat untuk pengembangan program KB yang bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat sehingga memberikan manfaat besar bagi pembangunan



PATTIRO

